

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

ULFIA FITRIA NINGSIH

ABSTRAK

Implementasi kebijakan KJP Plus pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat mempunyai sejumlah persoalan, sehingga dapat diartikan pelaksanaannya belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan KJP Plus pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dilihat dari sudut pandang model implementasi kebijakan Grindle dan Hak Atas Pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif dan analisis data dengan pendekatan bersifat induktif. Penulis berusaha memahami objek penelitian dengan menggunakan teori yang ada, dan dikaitkan serta dikembangkan dengan data yang telah diperoleh untuk menjadi suatu hipotesis. Model implementasi kebijakan Grindle mempunyai 2 (dua) variabel penting yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan, antara lain (1) Isi Kebijakan dan (2) Lingkungan Implementasi. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa derajat perubahan yang diharapkan dari kebijakan KJP Plus belum tercapai karena masih terdapat hambatan, khususnya dalam pendistribusian KJP Plus, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pemahaman kebijakan oleh para implementor, dalam hal ini Pihak Sekolah perlu terlibat untuk melakukan pendataan dan verifikasi lebih lanjut (*check and balance*) data calon penerima KJP Plus. Persoalan lain yaitu pengawasan yang kurang maksimal terhadap para penerima KJP Plus sehingga masih terjadi penyalahgunaan dana. Pelaksanaan KJP Plus dalam kaitannya dengan pemenuhan Hak Atas Pendidikan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendukung dan menjamin terselenggaranya Program Wajib Belajar 12 Tahun untuk masyarakat DKI Jakarta.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Hak Atas Pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

IMPLEMENTATION OF THE JAKARTA SMART CARD (KJP) PLUS POLICY AT THE ELEMENTARY SCHOOL (SD) EDUCATION LEVEL IN TANAH ABANG DISTRICT, JAKARTA PUSAT

ULFIA FITRIA NINGSIH

ABSTRACT

The implementation of the KJP Plus policy at the elementary school level in Tanah Abang District, Central Jakarta has a number of problems, so it can be interpreted that its implementation has not been optimal. The purpose of this study was to analyze how the KJP Plus policy was implemented at the elementary school level in Tanah Abang District, Central Jakarta from the point of view of the Grindle and Right to Education policy implementation model. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive research design and data analysis with an inductive approach. The author tries to understand the object of research by using existing theory, and associated and developed with the data that has been obtained to become a hypothesis. Grindle's policy implementation model has 2 (two) important variables that can determine the success and failure of a policy implementation, including (1) Policy Content and (2) Implementation Environment. The final results of the study show that the degree of change expected from the KJP Plus policy has not been achieved because there are still obstacles, especially in the distribution of KJP Plus, so it is necessary to evaluate and understand the policy by implementers, in this case the school needs to be involved to collect data and verify more continue (check and balance) the data of prospective KJP Plus recipients. Another problem is supervision that is less than optimal for KJP Plus recipients so that there is still misuse of funds. The implementation of KJP Plus in relation to fulfilling the Right to Education shows that the Provincial Government of DKI Jakarta has supported and guaranteed the implementation of the 12 Year Compulsory Education Program for the people of DKI Jakarta.

Keywords: *Policy Implementation, Right to Education, Jakarta Smart Card (KJP) Plus*